



PERUBAHAN RENCANA KERJA

T.A 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. SULSEL



B A B I P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Kondisi Indonesia sampai dengan tahun 2023 diperkirakan masih dipengaruhi oleh pandemic covid-19 sehingga pembangunan di Indonesia dan Khususnya di Sulawesi Selatan diarahkan untuk mendukung kondisi tersebut, selain itu kita juga masih menghadapi revolusi industri dan transformasi digital (era revolusi industri 4.0) dimana peran manusia menjadi terbatas yang dikuasai oleh industri dan teknologi komunikasi agar mengurangi kontak langsung untuk menghindari penyebaran virus covid-19. Disisi lain perkembangan teknologi yang begitu pesat terutama teknologi digital dapat menyebabkan kerawanan tersendiri dari sisi IPOLEKSOSBUDHUKAM terutama peredaran berita bohong atau hoaks yang dapat mengancam 4 pilar yaitu 1. Pancasila, 2. UUD 1945, 3. Bhineka Tunggal Ika, 4. NKRI, selain itu transaksi digital juga sering dimanfaatkan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta tindakan criminal lainnya terutama yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kondisi politik di Sulawesi Selatan.

Pembangunan suatu daerah tidak lepas dari stabilitas daerah tersebut ditinjau dari segi IPOLEKSOSBUDHUKAM karena suatu daerah tidak bisa melakukan pembangunan jika stabilitas daerah tidak kondusif. Oleh karena itu pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan akurat sehingga diperlukan suatu perencanaan yang sistematis dan berkesinambungan.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Umum dan OPD yang melaksanakan tugas Pemerintahan Umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun dalam pelaksanaannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga terlibat dalam melaksanakan tugas absolute dan konkuren.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Prinsip *Good Governance* yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Prov. Sulsel No. 10 Tahun 2008 tentang RPJPD Prov. Sulsel tahun 2008-2028;
14. Peraturan Daerah Prov. Sulsel No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
16. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021, tanggal 29 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan jangka pendek Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel dengan memperhatikan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel.

Tujuan

Tercapainya tujuan dan sasaran program kerja Badan Kesbangpol Prov. Sulsel Tahun 2023 secara efektif dan efisien sesuai kebijakan, program dan strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Bakesbangpol Prov. Sulsel Tahun 2018 – 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bakesbangpol Prov. Sulsel Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan Renja Bakesbangpol Prov. Sulsel Tahun 2023.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah merupakan Bab yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah merupakan Bab yang memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, Sasaran Renja Badan Kesbangpol Prov. Sulsel, Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan Bab yang memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

Bab V Penutup merupakan Bab Penutup.

B A B II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Tahun 2021 secara keseluruhan dapat dicapai dengan tingkat capaian rata-rata 100%, walaupun pada tahun 2021 Indonesia masih mengalami bencana nasional yaitu wabah Covid-19 akan tetapi kita tetap bisa melaksanakan program kegiatan sesuai target yang ada, dengan Rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan capaian 100%, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan capaian 368.75 %, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya dengan capaian 100%, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan capaian 125%, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan capaian 112.62%, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan capaian 75%.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Pada tahun 2023 merupakan akhir periode Renstra Bakesbangpol sehingga tingkat pencapaian indikator diharapkan memenuhi total pencapaian akhir periode Renstra dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini memiliki 3 indikator, 8 kegiatan, dan 56 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar rata-rata 100% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 100%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh target renstra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi

dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material, Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Pengadaan Mebel, Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 6 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 20% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 60%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh target renstra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan terdiri dari beberapa sub kegiatan yang meliputi, sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan, sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

3. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 20% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 60%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh target resntra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

A. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang meliputi sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Program ini memiliki 2 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian pada Indikator Persentase Penyalahgunaan Narkoba sebesar 20% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 40% dan indikator Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani sebesar 100% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 100%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh target resntra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

A. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 20% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 60%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh target resntra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dan sub kegiatan Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

6. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ketahanan Ekonomi Daerah.

Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 82% dengan tingkat capaian akhir periode renstra >79%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh targer resntra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

A. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dan terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemantauan Situasi Politik di Daerah Fasilitasi Kelembagaan, sub kegiatan enyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemantauan Situasi Politik di Daerah Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada table T-B.3 dibawah ini:

Tabel. T-B.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/S UBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun N- 1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		KET.
												TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2					3	4	6		7		8			13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		16 = 15/6*100%	17	18
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8	01	0.00.0.00. 25.0000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik															
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	60.0	874,625,959.48	0.0	0.0	20.0	274,996,630.0	168,493,630.0	15.0	88,268,130.0	75.0	52.39			
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 02	1.0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Gerakan Bela Negara	1,500.0	874,625,959.48	0.0	0.0	500.0	274,996,630.0	168,493,630.0	500.0	88,268,130.0	100.0	52.39			
							jumlah laporan pembinaan ideologi, karakter, dan wasbang	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0				
							jumlah laporan forum pembauran kebangsaan (FPK)	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0				

								jumlah laporan pemantapan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah		4.0			0.0			4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 03	1.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik di Sulsel	6.0	24,286,876,498.55	0.0	0.0	2.0	7,636,189,068.0	6,986,849,456.0	2.0	6,686,535,917.0	100.0	95.70					
							Jumlah Peserta Pendidikan Politik Masyarakat	300.0		0.0		100.0			100.0		100.0						
							Jumlah Laporan Bantuan Keuangan Parpol	3.0		0.0		1.0			1.0		100.0						
							Jumlah Pertemuan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia	3.0		0.0		1.0			1.0		100.0						
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 03	1.0 1	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.0	129,589,668.72	100.0	0.0	1.0	40,745,100.0	19,137,500.0	1.0	18,850,500.0	100.0	98.50				
							jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.0		0.0		1.0			1.0		100.0						

	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 03	1.0 1	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.0	551,625,401.41	100.0	0.0	1.0	173,440,000.0	118,499,500.0	1.0	103,619,445.0	100.0	87.44				
								jumlah laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.0		0.0		1.0			1.0		100.0					
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 03	1.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.0	23,126,405,055.98	100.0	0.0	1.0	7,271,317,968.0	6,729,439,456.0	1.0	6,495,242,372.0	100.0	96.52				

[illegible]

								Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.0		0.0		1.0				1.0		100.0							
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100.0	15.91						
							Predikat Kinerja																			
	8	01	0.00.0.00.25.0000	8.01.04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaan	60.0	6,887,179,446.40	0.0	0.0	20.0	2,165,441,258.0	140,728,600.0	25.0	129,899,408.0	125.0	92.30							
	8	01	0.00.0.00.25.0000	8.01.04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Usulan Surat Keterangan Terdaftar yang Dikelola	3.0	6,887,179,446.40	0.0	0.0	4.0	2,165,441,258.0	140,728,600.0	5.0	129,899,408.0	125.0	92.30							
	8	01	0.00.0.00.25.0000	8.01.04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.0	168,773,073.84	100.0	0.0	1.0	53,065,000.0	16,343,000.0	1.0	16,343,000.0	100.0	100.0							
	8	01	0.00.0.00.25.0000	8.01.04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.0	6,619,698,693.71	100.0	0.0	1.0	2,081,340,958.0	93,350,300.0	1.0	84,361,478.0	100.0	90.37							

		8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 04	1.0 1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan	3.0	98,707,678.85	100.0	0.0	1.0	31,035,300.0	31,035,300.0	1.0	29,194,930.0	100.0	94.07				
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										60.0	18.96					
								Predikat Kinerja																
		8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	0.0	3,893,677,029.23	0.0	0.0	0.0	1,224,235,400.0	1,505,441,400.0	58.0	1,427,380,821.0	0.0	94.81				
									Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	100.0		0.0		100.0			100.0		100.0					
		8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 05	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	jumlah laporan pemetaan potensi kerawanan terhadap kerukunan umat beragama dan multi etnis	12.0	3,893,677,029.23	0.0	0.0	4.0	1,224,235,400.0	1,505,441,400.0	3.0	1,427,380,821.0	75.0	94.81				
									Jumlah Peserta Dialog publik peningkatan ketahanan lembaga usaha ekonomi kab/kota	100.0		0.0		100.0			100.0		100.0					
									Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi daerah	12.0		0.0		4.0			6.0		150.0					
									Jumlah laporan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	12.0		0.0		4.0			5.0		125.0					
									Jumlah Laporan Satgas Kontra terorisme, radikalisme dan narkoba	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0					

8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 05	1.0 1	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12.0	540,003,865.34	100.0	0.0	4.0	169,786,000.0	301,001,000.0	4.0	300,977,082.0	100.0	99.99				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 05	1.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9.0	3,196,727,086.24	100.0	0.0	3.0	1,005,103,000.0	1,157,683,000.0	3.0	1,090,641,560.0	100.0	94.21				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 05	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.0	142,064,532.14	100.0	0.0	1.0	44,667,400.0	42,078,400.0	1.0	31,465,712.0	100.0	74.78				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 05	1.0 1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9.0	14,881,545.51	100.0	0.0	3.0	4,679,000.0	4,679,000.0	3.0	4,296,467.0	100.0	91.82				

						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											80.0	18.04						
						Predikat Kinerja																		
	8	01	0.00.0.00.25.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	60.0	6,023,534,140.13	0.0	0.0	20.0	1,893,897,124.0	2,321,545,100.0	73.75	2,067,332,883.0	368.75	89.05						
	8	01	0.00.0.00.25.0000	8.01.06	1.0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pemetaan Konflik Wilayah	6.0	6,023,534,140.13	0.0	0.0	2.0	1,893,897,124.0	2,321,545,100.0	2.0	2,067,332,883.0	100.0	89.05						
							Jumlah Laporan Pengawasan dan pemantauan Orang Asing NGO dan lembaga asing	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0							
							Jumlah Laporan Koordinasi Tiga Pilar Bangdes Mantra	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0							
							Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian Trantibmas	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0							
							Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian unjuk rasa	36.0		0.0		12.0			12.0		100.0							
							Jumlah Objek yang membutuhkan pengamanan	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0							
							Jumlah Laporan Forum Kewaspadaan Dini Daerah Prov. Sulsel	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0							
							Jumlah peserta rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah	300.0		0.0		100.0			137.0		137.0							
							Jumlah Laporan Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa	36.0		0.0		12.0			12.0		100.0							
							Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	36.0		0.0		12.0			11.0		91.67							

		8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 06	1.0 1	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	3.0	54,068,449.17	100.0	0.0	1.0	17,000,000.0	17,000,000.0	1.0	0.0	100.0						
									jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	3.0		0.0		1.0			1.0		100.0						
		8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 06	1.0 1	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	18.0	104,177,179.56	100.0	0.0	6.0	32,755,000.0	32,755,000.0	6.0	2,677,373.0	100.0	8.17					
									jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	18.0		0.0		6.0			6.0		100.0						

	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 06	1.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	18.0	2,974,109,864.61	100.0	0.0	6.0	935,108,524.0	1,464,399,500.0	6.0	1,356,333,090.0	100.0	92.62				
								jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	18.0		0.0		6.0			6.0		100.0					
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 06	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	24.0	470,471,839.70	100.0	0.0	8.0	147,924,000.0	108,056,000.0	8.0	78,129,195.0	100.0	72.30				
								jumlah dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	24.0		0.0		8.0			8.0		100.0					

	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 06	1.0 1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	129.0	754,795,550.42	100.0	0.0	43.0	237,320,000.0	152,540,000.0	43.0	98,150,329.0	100.0	64.34				
							jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	150.0		0.0		50.0			50.0		100.0						
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 06	1.0 1	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	jumlah dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	18.0	1,665,911,256.67	100.0	0.0	6.0	523,789,600.0	546,794,600.0	6.0	532,042,896.0	100.0	97.30				
							jumlah dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	18.0		0.0		6.0			6.0		100.0						
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.0	9.30					
							Predikat Kinerja																
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100.0	34,990,033,299.98	0.0	0.0	100.0	11,002,174,588.0	8,695,073,083.0	100.0	7,722,008,721.0	100.0	88.81				
							Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100.0		0.0		100.0			100.0		100.0						

[illegible]

8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen laporan Keuangan Tepat Waktu	60.0	24,345,684,600.73	0.0	0.0	20.0	7,654,679,292.0	6,295,451,381.0	20.0	6,107,998,424.0	100.0	97.02				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.0	23,149,895,888.85	0.0	0.0	14.0	7,278,703,868.0	6,051,900,981.0	14.0	5,877,095,721.0	100.0	97.11				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.0	174,768,310.70	0.0	0.0	1.0	54,950,000.0	54,950,000.0	1.0	54,698,000.0	100.0	99.54				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	36.0	103,205,219.68	0.0	0.0	6.0	32,449,400.0	22,399,400.0	6.0	21,555,018.0	100.0	96.23				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36.0	61,580,783.11	0.0	0.0	12.0	19,362,000.0	1,800,000.0	12.0	910,000.0	100.0	50.56				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.0	174,590,202.87	0.0	0.0	2.0	54,894,000.0	44,559,000.0	2.0	34,084,000.0	100.0	76.49				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	36.0	2,633,451.52	0.0	0.0	1.0	828,000.0	828,000.0	1.0	818,433.0	100.0	98.84				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	36.0	491,316,893.45	0.0	0.0	12.0	154,478,024.0	114,950,000.0	12.0	114,863,000.0	100.0	99.92				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	36.0	187,693,850.55	0.0	0.0	1.0	59,014,000.0	4,064,000.0	1.0	3,974,252.0	100.0	97.79				
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.0	11.20				
					Predikat Kinerja																
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah persentase administrasi barang milik daerah yang terdata dengan baik	60.0	132,281,641.40	0.0	0.0	20.0	41,591,500.0	33,873,366.0	20.0	26,020,252.0	100.0	76.82				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.0	57,636,966.82	0.0	0.0	1.0	18,122,000.0	9,188,000.0	1.0	1,615,236.0	100.0	17.58				

8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.0	74,644,674.58	0.0	0.0	1.0	23,469,500.0	24,685,366.0	1.0	24,405,016.0	100.0	98.86				
						<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>											66.67	19.41				
						<i>Predikat Kinerja</i>																
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Prilaku Pegawai Prangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja	60.0	1,517,778,668.92	0.0	0.0	20.0	490,438,024.0	268,607,000.0	20.0	197,569,246.0	100.0	73.55				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah baju	174.0	324,140,352.77	0.0	0.0	58.0	101,915,000.0	48,565,000.0	58.0	48,565,000.0	100.0	100.0				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen	36.0	151,266,066.21	0.0	0.0	12.0	47,560,512.0	39,570,000.0	9.0	39,280,526.0	75.0	99.27				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen	36.0	138,232,389.46	0.0	0.0	12.0	43,462,512.0	35,472,000.0	12.0	35,203,720.0	100.0	99.24				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.0	146,302,862.46	0.0	0.0	1.0	46,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5	10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	jumlah orang yang mengikut sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	300.0	686,275,815.29	0.0	0.0	100.0	229,000,000.0	145,000,000.0	100.0	74,520,000.0	100.0	51.39				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	30.0	71,561,182.73	0.0	0.0	10.0	22,500,000.0	0.0	2.0	0.0	20.0					
						<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>											35.91	5.30				
						<i>Predikat Kinerja</i>																
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Kantor	60.0	4,632,106,544.48	0.0	0.0	20.0	1,463,021,512.0	1,067,483,500.0	20.0	644,502,940.0	100.0	60.38				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3.0	27,384,079.26	0.0	0.0	1.0	8,610,000.0	8,610,000.0	1.0	8,570,000.0	100.0	99.54				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan	9.0	150,316,649.69	0.0	0.0	3.0	47,262,000.0	47,262,000.0	3.0	46,634,999.0	100.0	98.67				

8	01	0.00.0.00.25.0000	X.XX.01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.0	301,562,004.50	0.0	0.0	2.0	94,816,000.0	77,800,000.0	2.0	62,060,000.0	100.0	79.77				
8	01	0.00.0.00.25.0000	X.XX.01	1.06	07	Penyediaan BahanMaterial	jumlah jenis bahan material	30.0	242,544,701.98	0.0	0.0	10.0	76,260,000.0	64,860,000.0	10.0	57,480,000.0	100.0	88.62				
8	01	0.00.0.00.25.0000	X.XX.01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah jenis Fasilitas Kunjungan Tamu	3.0	786,175,924.16	0.0	0.0	1.0	247,186,500.0	197,332,500.0	1.0	179,607,500.0	100.0	91.02				
8	01	0.00.0.00.25.0000	X.XX.01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.0	2,622,204,142.83	0.0	0.0	32.0	831,075,500.0	533,818,000.0	32.0	187,581,515.0	100.0	35.14				
8	01	0.00.0.00.25.0000	X.XX.01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0.0	60,178,183.93	0.0	0.0	100.0	18,921,000.0	6,901,000.0	100.0	6,768,926.0	100.0	98.09				
8	01	0.00.0.00.25.0000	X.XX.01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36.0	441,740,858.13	0.0	0.0	12.0	138,890,512.0	130,900,000.0	12.0	95,800,000.0	100.0	73.19				
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											72.73	7.55				
						Predikat Kinerja																
8	01	0.00.0.00.25.0000	X.XX.01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.0	714,963,960.01	0.0	0.0	20.0	224,796,300.0	105,594,900.0	20.0	105,502,900.0	100.0	99.91				
8	01	0.00.0.00.25.0000	X.XX.01	1.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah Pengadaan Mebel	15.0	76,331,928.24	0.0	0.0	2.0	24,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
8	01	0.00.0.00.25.0000	X.XX.01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.0	638,632,031.77	0.0	0.0	29.0	200,796,300.0	105,594,900.0	29.0	105,502,900.0	100.0	99.91				
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											20.0	9.99				
						Predikat Kinerja																
8	01	0.00.0.00.25.0000	X.XX.01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.0	562,348,561.58	0.0	0.0	20.0	176,811,536.0	183,671,536.0	20.0	141,091,936.0	100.0	76.82				
8	01	0.00.0.00.25.0000	X.XX.01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3.0	57,248,946.18	0.0	0.0	3.0	18,000,000.0	18,000,000.0	3.0	11,124,400.0	100.0	61.80				
8	01	0.00.0.00.25.0000	X.XX.01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.0	142,613,485.93	0.0	0.0	20.0	44,840,000.0	51,700,000.0	20.0	15,996,000.0	100.0	30.94				

8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.0	362,486,129.47	0.0	0.0	12.0	113,971,536.0	113,971,536.0	12.0	113,971,536.0	100.0	100.0				
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											75.0	16.06				
						Predikat Kinerja																
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	60.0	1,578,320,302.52	0.0	0.0	20.0	476,414,000.0	473,874,000.0	18.0	337,371,108.0	90.0	71.19				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.0	1,400,258,335.61	0.0	0.0	6.0	440,264,000.0	436,224,000.0	6.0	305,371,108.0	100.0	70.0				
							jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.0		0.0		17.0			17.0		100.0					
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.0	114,974,966.91	0.0	0.0	10.0	36,150,000.0	37,650,000.0	10.0	32,000,000.0	100.0	84.99				
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											42.86	12.92				
						Predikat Kinerja																

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan 2021. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah yang menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya. Dari perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Untuk Laporan Kinerja Tahun 2021, pengukuran kinerja keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan memanfaatkan data base kinerja. Data base kinerja ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja 2 sumber yaitu :

1. Data internal yang diperoleh oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Data eksternal yang berasal dari luar lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.

• Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Hingga akhir tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan Rencana Strategis pada Tahun ke-3 yaitu tahun 2021. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Adapun pengukuran ke 3 sasaran strategis tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	110
2.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	71,29
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	- Nilai SAKIP OPD - Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	90 95

		- Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik	100
		- Nilai Temuan Material LHP (%)	100%

2.2.1. Sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat

2.2.1.1 Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN
Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	110	21	523.8%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Untuk tahun 2020 target pada sasaran ini sebesar 110 Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik akan tetapi sampai dengan akhir 2021 badan kesatuan bangsa dan politik berhasil menekan sehingga hanya terjadi 21 kasus Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik dengan persentase capaian target hanya 523.8 % hasil ini didapat dari target 2021 dibagi realisasi capaian kinerja rumus ini dipakai dikarenakan metode yang ada di kesbangpol < target dinyatakan bagus.

2.2.1.2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2021	Tingkat pencapaian
Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	Kasus	420	21	2000%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas badan kesatuan bangsa dan politik berhasil meningkatkan kemandirian dan ketentraman masyarakat terbukti dengan berhasil menekan Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik (sebagai indikator). dimana target akhir rpjmd/ renstra sebesar 420 kasus berhasilkan di tekan untuk tahun ini hanya 21 kasus dengan tingkat pencapaian 2000 % hasil ini didapat dari target akhir RPJMD/RENSTRA dibagi realisasi 2021 rumus ini dipakai dikarenakan metode yang ada di kesbangpol < target dinyatakan bagus.

2.2.1.3 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Standar nasional	Capaian
1.	Meningkatnya keamanan dan ketentraman Masyarakat	Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	Kasus	21		-

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

2.2.1.4. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder antara lain TNI,POLRI, dan Badan Intelijen Daerah.
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota.



Ket: kepala badan kesbangpol melakukan Rapat dengan kepala BNN terkait Ranperda P4GN



Ket : Badan kesatuan bangsa dan politik menerima kunjungan Ormas



Ket : Badan kesatuan bangsa dan politik melakukan rapat komida dengan stakeholder



Ket : Badan kesatuan bangsa dan politik menerima aspirasi dari mahasiswa



Ket : Rakornas Bakesbangpol di Sulawesi selatan yang dihadiri plt. Gubernur sulsel terkait kolaboratif , kreatif dan inovatif



Ket : Badan kesatuan bangsa dan politik melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Bakesbangpol kab/kota

2.2.1.5. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	% Capaian kinerja	%Penyerapan anggaran	%Tingkat efisiensi
1.	meningkatnya keamanan dan ketentaraman masyarakat	100 %	82.13%	17.87%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran.

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran.

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 82.17% dengan capaian kinerja sebesar 100 % sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 17.87%.

2.2.1.6. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	Capaian kinerja
1.	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rp. 8,695,073,083	Rp. 7,722,008,721	88,81	100 %
2.	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Rp. 168,493,630	Rp. 88,268,130	52,39	75 %
3.	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp. 6,986,849,456	Rp. 6,686,535,917	95,70	99.73 %
4.	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp. 140,728,600	Rp. 129,899,408	92,30	125%
5.	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Rp. 1,505,441,400	Rp. 1,427,380,821	94,81	100 %
6.	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp. 2,321,545,100	Rp. 2,067,332,883	89,05	100%
	Jumlah	Rp.19,818,131,269	Rp.18,121,425,880	91,44	100

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan tabel diatas ada 6 program penunjang yang meningkatkan sasaran strategis meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% Dalam mencapai target pada sasaran ini, semua program yang ada secara bersama-sama menunjang tercapainya target yang telah ditentukan. Adapun program yang paling berperan dalam pencapaian target sasaran ini adalah

program peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, program pemeliharaan ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Secara keseluruhan pencapaian sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat dapat tercapai dengan baik pada tahun 2021 ini. Semua potensi konflik yang ada pada tahun 2021 dapat ditangani dengan baik melalui koordinasi dengan stakeholder terkait terutama Badan Intelijen Daerah, TNI, dan POLRI dan Masyarakat di Sulawesi Selatan.

2.2.1.7. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	satuan	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	Kasus	110	80	21

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Berdasarkan table diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, untuk analisis ini pada badan kesatuan bangsa dan politik berhasil menekan angka kasus jumlah konflik social yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik yang satuannya kasus dan berhasil menekan sebanyak 21 kasus.

2.2.2. Sasaran strategis meningkatnya indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan

2.2.2.1. Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	71,79	73,43	102,28

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas tahun 2021 badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2021 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan

berdasarkan data BPS tercatat sebesar 73,43 yang artinya target tersebut tercapai sebesar 102,28.

2.2.2.2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2021	Tingkat pencapaian
Nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Angka	71,79	73,43	102,28

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2021 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan berdasarkan data BPS tercatat sebesar 73,43 yang artinya target tersebut tercapai sebesar 102,28.

2.2.2.3. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indicator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Standar Nasional	Capaian
1.	meningkatnya nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Nilai indeks demokrasi di Sulawesi selatan	Angka	73,43	73,66	99,68%

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan tabel diatas Nilai IDI di Sulawesi selatan sebesar 73,43 dibandingkan dengan IDI (Nasional) sebesar 73.66, IDI Sulawesi selatan mendapatkan capaian sebesar 99,68% itu artinya cukup baik karena di atas 90%.

2.2.2.4. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder terkait dengan demokrasi antara lain LSM, Partai Politik, Media Cetak, Media Elektornik
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota



Ket : Plt gubernur bersama bakesbangpol prov. Sulsel melakukan pertemuan dengan petinggi Partai politik



Ket : plt gubernur dan bakesbang memberikan bantuan hibah kepada partai politik



Ket : Bakesbangpol melakukan rapat dengan insan PERS dan LSM



Ket : Bakesbangpol melakukan rapat dengan seluruh Kab/kota terkait kegiatan pemetaan dan monitoring kondisi politik



Ket : kepala badan kesbangpol menghadiri kegiatan partai politik golkar

2.2.2.5. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

	Sasaran	% Capaian kinerja	%Penyerapan anggaran	%Tingkat efisiensi
1.	meningkatnya nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan.	102,28%	95,70%	6,58 %

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran.

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 95,70 dengan capaian kinerja sebesar 102,28% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 6,58%

2.2.2.6. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	Capaian kinerja
1.	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp. 6,986,849,456	Rp. 6,686,535,917	95,70	99.74 %

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai pada tabel di atas untuk mendukung sasaran pada Indeks Demokrasi Indonesia terdapat 1 program dan 4 indikator yang menunjang untuk terjadinya peningkatan IDI sesuai realisasi keuangan sebesar Rp. 6,686,535,917 atau 95.70 %, dengan tingkat capaian kinerja 99.74 % sehingga program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran yang diinginkan untuk mencapai target.

2.2.2.7. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	Satuan	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Nilai indeks demokrasi di Sulawesi selatan	Angka	71.79	70.58	73,43

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan bahwa target di atas sebesar 71,79 dengan realisasi 2020

sebesar 70,58 dan realisasi 2021 sebesar 73,43 tabel ini menunjukkan terdapat peningkatan IDI di Sulawesi Selatan.

2.2.3. Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

2.2.3.1. Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai SAKIP OPD	90	74,05	82.27 %
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100 %	100 %	100%
Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik	100 %	100 %	100%
Temuan material LHP	100 %	100%	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 90 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2021 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2019 mendapat poin 74,08 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 82.27%.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2021 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%.

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2021 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%, Indikator ke 4 yaitu temuan material Lhp pada badan kesatuan bangsa dan politik di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2021 memperoleh target sebesar 100%.

2.2.2.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2021	Tingkat pencapaian
Nilai SAKIP OPD	Nilai	100	74,05%	74,05%
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	Persentase	100%	100 %	100 %
Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik	Persentase	100%	100%	100%
Temuan material LHP	persentase	100%	100%	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 100 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2021 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2021 mendapat poin 74,05 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 74,05%.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan akhir Rpjmd/Renstra tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2021 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%.

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2021 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%.

Sedangkan pada indicator ke 4 yaitu temuan material lhp yang ditargetkan pada akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2021 temuan material Lhp pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mencapai target sebesar 100%.

2.2.3.3. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indicator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Standar Nasional	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1. Nilai SAKIP OPD 2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan 3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik 4. Temuan Material Lhp	Persentase	74,05 100 100 100		

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

2.2.3.4. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Sarana dan Prasarana, Penerapan penilaian kinerja kehadiran dengan Berbasis IT (e-rkcmd, e-planning, e-budgeting) serta pelaporan kinerja yang tepat waktu.
- Dukungan dari ASN Bakesbangpol untuk meningkatkan kinerja sangat baik dalam peningkatan disiplin.





2.2.3.5. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	%Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100	88,81	11,19

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 88,81 % dengan capaian kinerja sebesar 100% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 11,19%.

2.2.3.6. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keungan	% capaian
1.	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rp. 8,695,073,083	Rp. 7,722,008,721	88,81	100 %

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai pada tabel realisasi keuangan di atas untuk mendukung sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan

perangkat daerah terdapat 1 program untuk mendukung tercapainya suatu target yang ingin dicapai sesuai pada table di atas kita dapat melihat persentase keuangan yang rata-rata tidak mencapai target dikarenakan anggaran pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah tidak mencukupi untuk membayarkan kegiatan tersebut dikarenakan mengalami pengeseran anggaran selama pada masa pandemic covid 19. tapi tingkat capaian kinerja pada table diatas menunjukkan persentase capaian sebesar 100%.

2.2.3.7 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	Satuan	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1. Nilai SAKIP OPD	Nilai	90	73,38	74,05
2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen (Perencanaan)	Persentase	100%	100%	100%
3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik		100%	100%	100%
4. Temuan Material Lhp		100%		100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Berdasarkan table diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan bahwa pada tahun 2020 rata-rata pencapaian diatas 73-100 % dan realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dengan pencapaian sebesar 74-100 % sehingga saat ini bakesbangpol sangat tercapai jika dibanding dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan pada nilai sakip sebesar 0,67 dan pada indicator ke 4 telah terjadi penambahan indicator oleh Menpan Rb pada saat melakukan Coching Klinik sehingga pada tahun 2020 tidak terdapat realisasi sesuai table di atas, tetapi badan kesatuan bangsa dan politik mendapat cukup baik dalam hal melaksanakan seluruh capaian kinerja pada tahun ini.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2019-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel, maka pada tahun anggaran 2021 telah dialokasikan anggaran dari dana APBD Prov. Sulsel dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 19,818,131,269,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18,121,425,880.0 (91.44%), Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut : Rincian Anggaran Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang jasa dan Belanja Hibah kemudian Belanja Modal terdiri dari : Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebelum dan setelah perubahan. Selanjutnya, terdapat DPPA untuk Belanja Daerah sehingga rincian anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel berubah menjadi

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
Belanja Daerah	24.196.934.068,00	19.818.131.269,00	(4.378.802.799,00)	(18,10)
Belanja Operasi	23.671.917.268,00	19.502.900.869,0	(4.169.016.399,00)	(17,61)
Belanja Modal	525.016.800,00	315.230.400,00	(209.786.400,00)	(39,96)

Belanja Daerah berupa belanja operasi dan belanja modal dengan alokasi satu tahun anggaran dan telah teralisasi Rp18,121,425,880,- atau 91,44% dari jumlah alokasi belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 19.818.131.269,00 Dibandingkan dengan tahun 2020 capaian realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung sebesar 98,15% maka tahun ini terjadi perbaikan dengan meningkatnya realisasi capaian keuangan belanja tidak langsung. Pada dokumen anggaran perubahan, belanja Operasi Berkurang sebesar Rp 4.378.802.799,00 hal ini disebabkan penyesuaian terhadap adanya rasionalisasi anggaran belanja Operasi pada tahun 2021.

Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp Rp18,121,425,880,- atau 91.44% dan dari anggaran tersebut memiliki sisa dana yang belum teralisasi sebesar Rp. 1,696,705,389.00. Jika dibandingkan tahun 2020 terjadi penurunan tingkat capaian realisasi keuangan, dengan tingkat capaian tahun 2020 sebesar 87,90%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Renstra 2018-2023 Bakesbangpol Prov. Sulsel menetapkan isu strategis yaitu Sulsel aman, damai dan demokratis dari beberapa pertimbangan yang di telaah seperti

Aspek Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Permasalahan Strategis. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi selatan sangat besar karena berpengaruh terhadap kondisi IPOLEKSOSBUDHUKAM yang berimplikasi terhadap stabilitas daerah sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan ujung tombak dari seluruh sector pembangunan dan merupakan salah satu tiang / pilar utama untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam memelihara persatuan dan kesatuan demi tegaknya Negara Kesatuahn Republik Indonesia, hal ini juga berdasarkan Undang – Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melaksanakan tugas Pemerintahan Umum, absolute dan kongkuren.

Peluang yang memberi dukungan terhadap kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Masih Tingginya semangat persatuan dimasyarakat untuk menjadi suatu bangsa.
2. Adanya pemahaman dan pengertian yang sama diantara elit di provinsi sulsel untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat.
3. Banyak nya lembaga independen yang mampu melakukan pengawasandan kontrol terhadap program dan pembangunan.

Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Terdapatnya potensi konflik vertikal dan horizontal dari aspek IPOLEKSOSBUDHUKAM.
2. Masih tingginya angka kemiskinan dan penganguran serta instabilitas harga komoditas pangan.
3. Masih tingginya ketimpangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan perkotaan, golongan umur dan jenis kelamin.
4. Terdapatnya gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan.
5. Tranformasi teknologi industry dan komunikasi.
6. Menguatnya sikap primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah dalam pengisian jabatan–jabatan strategis dilingkungan pemerintahan daerah.
7. Masih adanya penggunaan cara– cara penyampaian pendapat yangmengabaikan / melecehkan symbol–symbol Negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan serta masih adanya kecenderungan lebihmementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.

8. Melemahnya wawasan kebangsaan yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
9. Meningkatnya paham radikalisme ditengah masyarakat.

Setelah diadakan analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD, memiliki sejumlah permasalahan dan hambatan yang timbul dalam rangka melaksanakan visi dan misi kepala daerah di dapat sejumlah isu – isu penting dan merupakan isu – isu strategis yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah tergambar dalam table berikut:

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telaahan RTRW/K LHS	Isu- isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAAN DAN KARAKTER BANGSA	1. Menguatnya sikapprimordialis me dalam penyelenggara n pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah dalam pengisian jabatan–jabatan strategis dilingkungan pemerintahan daerah 2. Masih ada nya penggunaan cara–cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/ melecehkan symbol–symbol Negara, bahkan ada yang cenderung	Kualitas Keama n, Perdam aian dan demokr asi harus selalu berada di zona hijau	Visi : Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter Misi 4 Mewujudkan Kualitas Manusia yang kompetitif, inklusif dan Berkarakter		Sulsel aman, damai dan demokr atis

		anarkis dan serta masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum				
		3. Melemahnya wawasan kebangsaan yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan 4. Meningkatnya paham radikalisme ditengah masyarakat				
2	Permasalahan dalam Bidang POLITIK DALAM NEGERI	1. Terdapatnya gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan 2. Belum optimalnya organisasi sipil dalam memberikan pendidikan politik bagi				

		masyarakat				
3	Permasalahan dalam Bidang KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,	1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta instabilitas harga komoditas				
	AGAMA, DAN ORGANISASI	Pangan 2. Masih tingginya ketimpangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan perkotaan, golongan umur dan jenis kelamin Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta instabilitas harga komoditas pangan 3. Masih tingginya ketimpangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan perkotaan, golongan umur dan jenis				

		Kelamin				
4	Permasalahan dalam Bidang KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	1. Terdapatnya potensi konflik vertikal dan horizontal dari aspek IPOLEKSOSBU DHUKAM 2. Tranformasi teknologi industry dan komunikasi				

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan politik masuk dalam unsur pemerintahan umum dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung misi Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif serta misi Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter hal ini sudah sejalan dengan renstra Badan dan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang dibebankan dengan target indikator yang selaras dengan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain. Pada Rancangan awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebesar Rp.52.316.473.947,00-,

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2023 tetap akan berdasarkan Permendagri 90 dimana Program dan Kegiatan sudah ditetapkan yang bisa dilakukan hanya memilih Program Kegiatan yang sudah

tersedia. Jadi masyarakat hanya bisa mengusulkan Program atau Kegiatan ada di Permendagri 90 tersebut.

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas dan tetap menerima masukan atau usulan dari masyarakat, program dan kegiatan yang diajukan walaupun tidak melalui proses penjangkaran aspirasi dari stakeholder bidang kesatuan bangsa dan politik dengan pelaksanaan Forum OPD, namun koordinasi dilakukan melalui telepon dan media sosial whatsapp.

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan proses penjangkaran aspirasi dari stake holder dibidang Kesbang dengan melaksanakan Forum OPD.

B A B III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum di daerah merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang dibawah koordinasi ditjen politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tahun 2022 sampai dengan 2023 arah kebijakan rencana kerja ditjen Politik dan pemerintahan Umum penekanannya pada peningkatan IT dan Sumber Daya Manusia, sedangkan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi menyiapkan data yang dibutuhkan. Selain itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, khususnya dilampiran yang menyatakan tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 tahapannya dimulai pada bulan juni tahun 2022, sehingga Bakesbangpol prov. Sulsel sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum di Daerah, wajib mensuport baik dari sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan persatuan dalam rangka mewujudkan tujuan Renstra Bakesbangpol Prov. Sulsel.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka untuk mencapai prioritas pembangunan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi maka dalam Renstra Bakesbangpol 2018-2023 telah ditetapkan **tujuan pembangunan** daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

Mewujudkan Sulawesi Selatan yang aman, damai dan demokratis.

Berdasarkan tujuan jangka menengah tersebut maka ditetapkan tujuan renja 2023 sama dengan yang tertuang dalam Renstra.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan baik tujuan jangka menengah maupun tujuan renja tahun 2023 maka telah ditetapkan **sasaran** yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat.

2. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Dari ketiga sasaran diatas berdasarkan perubahan Renstra 2018-2023 telah ditetapkan perubahan indikatornya, Akan tetapi berdasarkan saran dari Kemenpan RB dan hasil asistensi PK oleh tim asistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami diminta untuk mengembalikan Indikator semula dengan rincian sebagai berikut :

➤ Semula :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Sulsel aman, damai dan demokratis	Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik		120	110	100	90
		Meningkatnya indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	70,79	71,29	71,29	71,79	71,79

2	Meningkatnya Akuntabilitas	Meningkatnya Akuntabilitas	% Capaian Kinerja Program Prangkat Daerah			90	95	100
			Nilai Temuan Material LHP			100	100	100

➤ Menjadi :

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Sulsel aman, damai dan demokratis	Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Persentase potensi konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	70,79	71,29	71,29	71,79	71,79
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	80	85	90	95	100
			Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah			90	95	100
			Nilai Temuan Material LHP yang diselesaikan			100	100	100

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam menyusun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Bakesbangpol tahun 2023 merujuk pada permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventraisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renstra Perubahan Bakesbangpol Prov. Sulsel 2018-2023, terdapat perbedaan antara permedagri 13 yang merupakan pedoman penyusunan terdahulu dibandingkan dengan permendagri 90 terutama dari segi prinsip dasar, pada permendagri 90 yang dipakai saat ini kita tidak diberi ruang untuk membuat sendiri nama program, kegiatan dan sub kegiatan tetapi hanya bisa memilih dari daftar yang sudah ada, bahkan inti latar sub kegiatan juga telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventraisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu dalam memilih program, kegiatan dan sub kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik memperhatikan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang berdasarkan permendagri 86 tahun 2017 dalam hal ini OPD atau badan kesatuan bangsa dan politik tidak diperkenankan lagi merumuskan visi dan misi tetapi harus merujuk pada visi dan misi kepala daerah. Visi dan misi kepala daerah yang dijadikan rujukan badan kesatuan bangsa dan politik adalah misi 1 dan misi 4 yaitu : 1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif dan misi, 4 .Mewujudkan Kualitas Manusia yang kompetitif, inklusif dan Berkarakter.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya sesuai dengan permendagri 86 tahun 2017 seperti SDG'S, NSPK dan SPM khusus untuk badan kesatuan bangsa dan politik prov sulsel kami tidak memiliki target dari pemerintah pusat.

Berdasarkan metode diatas badan kesatuan bangsa dan politik mengajukan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri dari 6 program, 13 Kegiatan dan 93 Sub kegiatan. Sebagaimana terlampir pada Tabel. T-C.33:

Tabel. T-C.33

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										53,606,119,214	55,653,601,462			29,355,170,584	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										9,472,961,184	9,790,169,012			13,777,721,481	
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										254,632,876	723,495,024			568,016,801	
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	2 Dokumen		170,731,100	639,441,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		254,507,863
8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen		1,369,600	1,369,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		78,476,772
8	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen		9,901,500	9,901,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		81,146,579
8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen		5,901,500	5,901,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13,220,553
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen		4,095,000	4,095,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,067,807
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				21 Laporan	21 Laporan		31,711,176	31,862,724	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		113,756,225

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
8 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			30,923,000	30,923,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,841,002
8 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6,354,364,589	6,338,995,374	9,191,561,769				
8 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan			6,123,865,137	6,108,192,826	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,740,099,179
8 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Dokumen	12 Dokumen			30,027,100	30,027,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				38,964,489
8 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Dokumen	12 Dokumen			10,931,800	10,931,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				23,249,442
8 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			3,843,600	3,843,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,915,445
8 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			1,996,800	1,996,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				994,243
8 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			173,063,352	174,345,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				185,493,637

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur				Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			SKPD															
8 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen			10,636,800	9,657,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,862,646	
8 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											51,348,000	51,348,000	49,942,111				
8 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			31,170,000	31,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,760,478	
8 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			20,178,000	20,178,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,181,633	
8 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											228,835,752	179,138,848	565,745,731				
8 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket			87,050,000	87,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			122,377,174	
8 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					12 Dokumen	12 Dokumen			58,379,776	58,531,324	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			57,109,562	
8 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Dokumen	12 Dokumen			33,405,976	33,557,524	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52,188,779	
8 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Orang 1 Orang	0 Orang 1 Orang			50,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,235,736	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.23.0000 BADAN RESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan															
8 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											967,950,276	1,143,132,224					1,578,405,415
8 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			41,124,800	31,242,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,338,689
8 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket 0 Paket	1 Paket 0 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				56,751,116
8 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			125,390,300	125,390,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				113,852,859
8 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			19,801,000	19,801,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				91,571,243
8 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			230,833,200	230,833,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				296,815,829
8 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			516,346,200	701,258,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				986,355,780
8 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Dokumen	12 Dokumen			34,454,776	34,606,324	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			SKPD															
8 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											369,556,000	432,567,500					1,004,930,196
8 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		735,000,000	
8 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Paket	1 Paket			186,728,000	163,648,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28,818,645	
8 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				29 Unit	29 Unit			182,828,000	268,919,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		241,111,551	
8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											436,905,591	298,413,942					212,311,200
8 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan			436,905,591	298,413,942	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		136,854,383	
8 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											809,368,100	623,078,100					606,808,258
8 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				23 Unit	23 Unit			598,545,000	412,255,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		528,658,824	
8 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0 Unit	0 Unit			8,323,100	8,323,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	
8 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit			55,000,000	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43,408,084	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Unit	1 Unit			147,500,000	147,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34,741,350	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											7,534,682,260	3,146,371,100				798,696,829	
8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											7,534,682,260	3,146,371,100				798,696,829	
8 01 02 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Dokumen	6 Dokumen			251,970,900	251,970,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			113,874,029	
8 01 02 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Dokumen	0 Dokumen			6,597,888,560	1,097,878,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
8 01 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Orang	8 Orang			684,822,800	1,796,521,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			684,822,800	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											6,475,597,552	5,505,655,648				9,169,359,135	
8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik											6,475,597,552	5,505,655,648				9,169,359,135	
8 01 03 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua			1 Dokumen	1 Dokumen			5,507,500	5,507,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,925,773	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		Kelurahan													
8 01 03 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Dokumen	3 Dokumen			167,590,992	167,894,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			208,262,739	
8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 Orang	200 Orang			6,213,141,760	5,243,141,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,731,230,361	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8 01 03 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Orang	6 Orang			28,329,100	28,084,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,474,760	
8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Laporan	2 Laporan			61,028,200	61,028,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			115,465,502	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											106,374,400	106,374,400	1,865,211,755				
8 01 04 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											106,374,400	106,374,400	1,865,211,755				
8 01 04 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			32,445,600	32,445,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63,719,224	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun															
8 01 04 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 Orang	200 Orang			30,525,400	30,525,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,764,226,061
8 01 04 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Orang	0 Orang			23,567,000	23,567,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
8 01 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			19,836,400	19,836,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37,266,470

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											1,378,277,900	1,378,277,900				1,470,033,540	
8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											1,378,277,900	1,378,277,900				1,470,033,540	
8 01 05 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Dokumen	4 Dokumen			58,044,500	58,044,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			203,875,100	
8 01 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 Orang	200 Orang			1,236,091,200	1,236,091,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,206,904,425	
8 01 05 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200 Orang	200 Orang			47,134,000	47,134,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			53,635,580	
8 01 05 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			3 Laporan	3 Laporan			37,008,200	37,008,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,618,435	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Semua Kelurahan													
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											28,638,225,918	35,726,753,402				2,274,147,844	
8 01 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											28,638,225,918	35,726,753,402				2,274,147,844	
8 01 06 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			1,572,000	1,572,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,413,208	
8 01 06 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Dokumen	12 Dokumen			1,572,000	1,572,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,331,446	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8 01 06 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			300 Orang	300 Orang			28,209,681,718	35,152,998,002	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,122,856,678
8 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Orang	8 Orang			8,257,000	8,257,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				177,623,716
8 01 06 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			93 Laporan	93 Laporan			58,743,200	142,354,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				284,968,365

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.25.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
8 01 06 1.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Dokumen	12 Dokumen			358,400,000	420,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			628,954,431	
TOTAL												53,606,119,214	55,653,601,462				29,355,170,584	

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Perubahan Rancangan Akhir Renja sebagaimana terlampir.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan menyediakan berbagai kebutuhan Barang dan Jasa kantor termasuk barang modal/asset serta dukungan administrasi perjalanan dinas, program ini memiliki 3 indikator yaitu % Realisasi Kegiatan Prangkat Daerah, % ASN Prangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik, % Penurunan temuan berdasarkan LHP. Terdapat 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.9.790.169.012,- dengan rincian Sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - B. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - C. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - D. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - E. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - F. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - G. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - B. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - C. Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - D. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - E. Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - F. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- G. Sub kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - B. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - B. Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - C. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - D. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - B. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - C. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - D. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - E. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - F. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - G. Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - A. Sub kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - B. Sub kegiatan Pengadaan Mebel
 - C. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - B. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - C. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - D. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- II. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan memiliki 1 indikator yaitu:
 - % Tingkat keikutsertaan aparat dan masyarakat bela negara. Dalam program ini terdapat 1

kegiatan dan 3 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.3.146.371.100,00- sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
 - B. Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
 - C. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
- III. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, program ini memiliki 2 indikator yang salah satu indikatornya masuk dalam indikator prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi selatan yaitu % Penurunan Penyalahgunaan Narkoba, indikator lainnya yaitu % Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp. 1.378.277,00,- dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - A. sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - B. sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - C. sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - D. sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- IV. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 1 indikator yaitu : % organisasi kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaan, program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.106.377.800,00,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
 - A. sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - B. sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - C. sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - D. sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- V. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, pada program ini memiliki 1 indikator yaitu % Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan terdapat 1 kegiatan dan 5 Sub kegiatan, yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.5.505.655.648,00,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik terdiri dari sub kegiatan yaitu:
 - A. sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemantauan Situasi Politik di Daerah Fasilitasi Kelembagaan.
 - B. sub kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

- Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- C. sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah.
 - D. sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - E. sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- VI. Program Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan 1 indikator % Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp. 35.726.753.402,00,-dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan terdiri dari beberapa sub kegiatan yang meliputi:
 - A. sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan,
 - B. sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
 - C. sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,

- D. sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
- E. sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
- F. sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dalam Rencana kerja Bakesbangpol pada tahun 2023 ini pendanaan yang tertera diatas masih pagu indikatif, sehingga pencapaian indikatornya pun sesuai dengan pagu tersebut, apabila pagu indikatifnya tidak sama apalagi dibawahnya ada kemungkinan pencapaian indikator akan menurun.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pada renja Bakesbangpol tahun 2023 khususnya dari segi pendanaan bisa terpenuhi 100% sesuai pagu indikatif, diharapkan bisa memenuhi seluruh target indikator yang ada, apabila tidak, kemungkinan pencapaian target indikator juga mengalami penurunan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Bakesbangpol akan berkoordinasi dengan Bappelitbangda dan BPKAD untuk rencana pendanaan.

Makassar,

2023



KEPALA BADAN KESBANGPOL PROV. SULSEL

Drs. Muhammad Firda, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19631231 198803 1 132



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 968/ VI / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590)
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Nomor 20)

14. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 Juni 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Tempat